

## 18 Terduga Teroris yang Diamankan di Sulsel Masih Berstatus Terperiksa

MAKASSAR (IM) - Sebanyak 18 terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang diamankan di 3 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Rabu (6/1) lalu, masih belum ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan mengatakan, 18 terduga teroris itu masih berstatus terperiksa. Mereka kini masih diperiksa tim Densus 88 di Polda Sulsel.

"Jadi masih fokus (pemeriksaan), kan kewenangan mereka kan tujuh hari untuk menetapkan tersangka. Kita tunggu saja setelah tujuh hari siapa-siapa yang dijadikan tersangka," ujar Zulpan kepada wartawan, Selasa (12/1).

Zulpan juga belum bisa memastikan terkait 18 orang yang diamankan itu apakah akan dibawa ke Jakarta atau tidak. Namun, terkait belum dilakukannya penetapan tersangka, menurut Zulpan, hal itu sudah sesuai aturan dalam Undang-undang Terorisme. Bila dalam pemeriksaan ada yang tidak terbukti, polisi akan melepaskannya.

"Masalahnya kan mereka ditemukan di TKP, ada di rumah-rumah itu waktu digerebek. Mereka ada semua di situ," kata Zulpan. Zulpan menyebut, terduga teroris jaringan JAD Sulsel termasuk dua orang yang

ditembak mati sebelumnya dan memiliki rencana untuk melakukakan bom bunuh diri.

Namun dia mengimbau masyarakat untuk tidak panik mengenai rencana tersebut. Lantaran, tim Densus sudah mengamankan mereka.

"Makanya cepat ditindaki Densus. Walau ada dua korban meninggal karena mereka menyerang petugas dengan senjata tajam dan bahkan senjata api," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdiansyah menyebut, 20 terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulsel ditangkap Densus 88 Mabes Polri bersama Polda Sulsel, Rabu (6/1) lalu di lima lokasi berbeda.

Selain di perumahan Villa Mutiara Cluster Biru yang menyebabkan MR dan SA meninggal dunia, tim gabungan Densus 88 Mabes Polri dan Polda Sulsel juga mengamankan beberapa terduga teroris di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.

Tiga lokasi penangkapan lainnya berada di Kecamatan Tallo Makassar, Kecamatan Somba Opu di Kabupaten Gowa, serta Desa Taulo, Kecamatan Alla di Kabupaten Enrekang. • **ius**

# 12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



## DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 DI BANTEN

Personil kepolisian mengawal vaksin Covid-19 untuk pendistribusian ke Kabupaten/Kota di Gudang Farmasi Dinkes Provinsi Banten, Serang, Selasa (12/1). Pemprov Banten memberi prioritas penyuntikan vaksin untuk petugas kesehatan di Kota Tangsel dan Kota Serang masing-masing 8.920 dosis dan 3.380 dosis dimana jumlah pasien Covid-19 di kedua wilayah tersebut meningkat.

## Komjen Listyo Calon Tunggal Kapolri?

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, yakin Jokowi hanya mengusulkan satu nama calon Kapolri, yang diajukan ke DPR untuk dimintai persetujuan yaitu Komjen Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mengirim nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz ke DPR.

"Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih banyak, tapi yang paling mungkin adalah Komjen Listyo Sigit Prabowo," kata Mahfud MD di akun twitternya @mohmahfudmd, Selasa (12/1).

Hingga saat ini, kata Mahfud, orang nomor satu di Indonesia itu masing-masing mempertimbangkan secara seksama terkait pergantian kapolri tersebut.

"Blm ada yg tahu siapa calon Kapolri kita sebab Presiden msh trs mempertimbangkan scr seksama siapa yg paling tepat utk jabatan tsb," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mengusulkan satu nama calon Kapolri, yang diajukan ke DPR untuk dimintai persetujuan yaitu Komjen Listyo Sigit Prabowo.

"Menurut saya hanya satu nama yang diusulkan (menjadi calon Kapolri), Listyo Sigit Prabowo yang terkuat dan punya kedekatan. Insyaallah, akan terpilih jika Allah Swt. dan

Presiden menghendakinya," kata Jazilul Fawaid (Gus Jazil).

Gus Jazil mengaku, banyak para pewarta yang menanyakan kepadanya terkait kapan nama calon Kapolri diajukan kepada DPR untuk dimintai persetujuan dan uji kelayakan dan kepatutan.

Menurut dia, kemungkinan pada hari Rabu 13 Januari 2021 baru surat presiden (surpres) tentang nama calon Kapolri akan keluar.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkeran cara khas Presiden Jokowi ketika memilih pejabat baru yang ditunjuknya. Mahfud mengungkapkan hal ini seiring mengerucutnya nama-nama calon kapolri yang kini sudah di tangan Jokowi.

"Cara khas yang sering dilakukan Presiden dalam memilih pejabat: meminta dibuatkan lima draf surat pengusulan yang berisi nama-nama yang

berbeda," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (12/1).

Mahfud mengatakan, pada saat yang tepat, Jokowi nantinya langsung menandatangani salah satu draf yang dipilihnya. Sedangkan draf yang tersingkir akan langsung dimusnahkan.

"Jadi tidak ada yang tahu kecuali setelah diumumkan secara resmi," kata Mahfud.

Dalam cuitan sebelumnya, Mahfud membantah bahwa Presiden sudah menunjuk satu nama menjadi penerus Jenderal Pol Idham Azis sebagai Kapolri. Sejauh ini, Presiden juga belum mengirimkan nama calon kapolri ke DPR. Sebab, Jokowi saat ini masih dalam tahap pertimbangan secara seksama siapa yang paling tepat untuk menduduki jabatan tersebut.

Hingga saat ini, nama calon kapolri pengganti Idham tersebut masih menjadi misteri. Penunjukan kapolri memang menjadi hak prerogatif seorang Presiden. Presiden Jokowi telah menerima rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas). Total terdapat lima nama jenderal polisi berbintang tiga atau komisaris jenderal yang diusulkan Koppolnas kepada Jokowi.

Kelima adalah Kepala Bareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, serta Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Nantinya, Presiden bakal mengirim surat kepada DPR yang berisi nama calon kapolri. Calon itu selanjutnya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar DPR. Adapun DPR dapat menolak atau menyetujui usulan Presiden. • **ius**



IDN/ANTARA

PERATURAN KERINGANAN BIAYA PEMBUATAN SIM Petugas kepolisian melayani pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM di Polresta Mataram, NTB, Selasa (12/1). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia yang salah satunya memuat opsi keringanan biaya hingga Rp0 atau penggratisan biaya terkait pengurusan SIM bagi masyarakat yang berhak mendapatkan SIM gratis antara lain warga miskin, mahasiswa atau pelajar, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

## Polri Belum Terima Surat Resmi dari Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

JAKARTA (IM) - Polri mengaku masih belum menerima surat dari Komnas HAM perihal temuan serta rekomendasi atas peristiwa bentrok antara anggota Polda Metro Jaya dengan laskar Front Pembela Islam (FPI).

"Kita masih menunggu surat dari Komnas HAM," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (12/1). Komnas HAM sebelumnya menyatakan, tewasnya empat dari enam anggota laskar FPI sebagai pelanggaran HAM dan direkomendasikan agar dilanjutkan ke pengadilan pidana.

Untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah membentuk tim khusus. Tim khusus tersebut bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh oknum polisi terhadap empat laskar FPI yang tewas.

Ramadhan menuturkan, tim yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri itu masih melakukan pendalaman.

"Tentunya masih kita dalam dan terus akan kita pelajari," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Komnas HAM mengungkapkan, pihaknya memang belum men-

girim laporannya kepada Polri. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, pihaknya masih menunggu waktu pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu sekaligus untuk menyerahkan laporan secara langsung.

"Kami belum mengirim surat ke Polri karena menunggu jadwal bertemu dengan presiden terlebih dahulu. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kemenko Polhukam," ungkap Beka, Selasa (12/1).

Dalam temuannya, Komnas HAM membagi peristiwa ini ke dalam dua konteks. Pertama, dua laskar FPI tewas ketika bersitegang dengan aparat kepolisian dari Jalan Internasional Karawang Barat sampai Tol Jakarta-Cikampek KM 49. Kedua, tewasnya empat laskar FPI lainnya yang disebut masuk pelanggaran HAM. Sebab, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian.

Diketahui, terdapat perbedaan keterangan antara polisi dan pihak FPI atas kejadian tersebut. Dari rekonstruksi, polisi menggambarkan bahwa anggota laskar FPI yang terlebih dahulu menyerang dan menembak polisi saat kejadian. Hasil rekonstruksi disebut belum final. • **ius**

## Bareskrim Periksa Habib Rizieq, Menantu dan Dirut RS Ummi Jumat Pekan Ini

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Shihab terkait kasus pengambilan tes swab di RS Ummi, Bogor.

Dir Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan selain Habib Rizieq, menantunya Habib Hanif Alatas dan Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat juga turut

diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Rencana, Jumat (15/1) diperiksa," kata Andi saat dikonfirmasi wartawan.

Terkait apakah ketiganya akan dilakukan penahanan atau tidak, hal tersebut bergantung pada proses pemeriksaan. "Rencananya begitu," ujarnya. Seperti diketahui bahwa Habib Rizieq bersama man-

tunya Habib Hanif Alatas dan Dirut RS Ummi Andi Taat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular, terkait pengambilan tes swab Habib Rizieq di RS Ummi, Bogor.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal berlipis, yakni Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU

No Tahun 1984. Kemudian Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946.

Sebagai informasi, RS Ummi dilaporkan dengan nomor LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA. Adapun pasal yang disangkakan, yakni Pasal 14 Ayat 1, 2 UU Nomor 4 Tahun 1984.

Dalam laporannya, RS Ummi diduga menghalangi

atau menghambat Satgas dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19 yang akan melakukan swab tes terhadap salah satu pasiennya yang diduga terpapar Covid-19.

RS Ummi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol proses penanganan terhadap pasien tersebut. • **ius**

## UPDATE TRAGEDI SRIWIJAYA AIR

### DVI Polri Berhasil Identifikasi 36 Sampel Bagian Tubuh Korban

JAKARTA (IM) - Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah mengidentifikasi 36 sampel bagian tubuh (body part) dari 74 bagian tubuh korban Sriwijaya Air SJ-182 yang diperoleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) hingga Senin (11/1) malam kemarin.

Meski begitu, ke 36 sampel itu masih diidentifikasi lebih jauh. Artinya DVI masih melakukan penelusuran apakah 36 body part merupakan anggota tubuh dari korban yang berbeda atau satu kesatuan dari manusia yang sama.

"36 sampel hasil dari DVI bahwa yang kemarin yang kita bawa ada 36 sampel. Potongan

akan dipisahkan sama dia mas, 36 itu total dari 74 bagian tubuh. Jangan jangan itu satu. Seperti yang sudah saya bilang kemarin bahwa yang kita prioritaskan adalah korban," ujar Kepala Kantor SAR Jakarta Hendra Sudirman, Selasa (12/1).

Sementara itu, 74 bagian tubuh merupakan hasil pencarian atau kerja sama yang dilakukan tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Bakamla, KPLP, KNKT, BMKG, dan seluruh Potensi SAR baik di permukaan maupun di dasar air.

Temuan bagian tubuh korban sudah diserahkan ke DVI. Sedan-

gkan material pesawat diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

#### 59 Sampel DNA

Sebanyak 59 sampel DNA keluarga korban Sriwijaya Air SJ 182 sudah diserahkan ke tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri di RS Polri Kramatjati guna kepentingan proses identifikasi.

"Dari diskusi yang kami lakukan dengan kepala RS, sebanyak 59 DNA (diterima tim DVI). Masih kurang tiga, tetapi info akan dikirim hari ini," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di RS Polri, Selasa (12/1) siang. Kepala Biro Penerangan Ma-

syarakat Divisi Humas (Karopenmas Divhumas) Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, tim DVI terus mencocokkan antemortem dan postmortem.

"Ini akan kami tindaklanjuti, apabila data-data sudah lengkap, data antemortem dan postmortem akan dilakukan tindakan-tindakan lanjut. Tindakan rekonsiliasi atau pencocokan sehingga teridentifikasi korban-korban dari kecelakaan," kata Rusdi.

Sejauh ini, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182, yakni atas nama Okky Bisma. Okky Bisma berusia 30 tahun, warga Kramatjati, Jakarta Timur.

Okky berhasil diidentifikasi berkat pencocokan antara sidik jari antemortem dan postmortem.

Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) telah menerbitkan akta kematian Okky. Tim DVI siap menyerahkan jenazah korban kepada keluarga. Namun, polisi saat ini masih menunggu persetujuan pihak keluarga.

"Pada prinsipnya tim DVI sudah siap, tetapi menunggu kesepakatan keluarga. Kemungkinan ada temuan bagian-bagian tubuh dari korban yang masih bisa ditemukan. Kami masih menunggu kesepakatan pihak keluarga," kata Rusdi. • **mar**

國際日報  
GUO JI RI BAO - Medan  
Lowongan Kerja 职位空缺  
MARKETING FREELANCE

Syarat :

- Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
- Penampilan Menarik dan Rapi
- Orientasi Target dan Komisi
- Minimal Lulusan SMA / Sederajat
- Berpengalaman di bidang Marketing
- Domisili Medan - Sumatera Utara

Lamaran dikirim Via Email :  
w.pandjaitan1@gmail.com



IDN/ANTARA

## PENGUNGKAPAN PUPUK ILEGAL

Kapolres Indramayu AKBP Hafidh Susilo Herlambang (kiri) menunjukkan barang bukti pupuk ilegal di Polres Indramayu, Jawa Barat, Selasa (12/1). Polres Indramayu berhasil mengamankan dua tersangka dan sebuah truk berisi 200 sak pupuk ilegal yang akan diedarkan di Indramayu.

## Kapolsek Cikarang Selatan Dicotot Buntut Kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, akhirnya mencopot Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Sukadi dari jabatannya. Hal itu dilakukan lantaran Sukadi dinilai lagi sehingga terjadi kerumunan orang di Waterboom Lippo Cikarang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusril Yunus mengatakan, kasus kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang masih diproses oleh Polres Metro Kabupaten Bekasi.

"Semua tetap akan diproses, tapi secara internal ada kelainan dari anggota, yakni Kapolsek. Sehingga didemosi," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (12/1).

Berkenaan dengan itu, Yusril berharap jajaran kepolisian di lingkungan Polda Metro Jaya dapat menjadikan hal sebagai pembelajaran.

Menurutnya, setiap Kaposlek mesti bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak ada lagi keru-

munan di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Ini bagian bentuk tindak lanjut dari arahan dan ketegasan Kapolda bahwa di masa pandemi Covid-19 ini tidak ada lagi membuat kerumunan. Termasuk di dalamnya kapolsek bertanggung jawab," tegasnya.

Seperti diketahui, kerumunan di Waterboom Cikarang setekah adanya diskon besar dari tempat wisata tersebut. Sebanyak 2.700 orang tercatat berkunjung ke wahana Waterboom Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya warga sekitar, beberapa pengunjung diketahui juga berasal dari Jakarta.

Padahal kondisi saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Bahakan pemerintah tengah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa dan Bali guna menekan angka penyebaran Covid-19. • **ius**